RESUME HUKUM TATA NEGARA

NAMA: ANDI MUHAMMAD SALSABIL

NIM:10200120224

KELAS : HTN F

A. PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum public. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kejian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga Negara.

Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht atau hukum dan apalagi sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai lehre atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai verfassungrecht (hukum konstitusi) dan sekaligus verfassunglehre (teorikonstitusi).

Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust) maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging).

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.

Keterkaitan antara hukum tata negara dengan ilmu lain nya di antaranya

1. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu Negara

Kedua bidang ilmu tersebut, Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara mempunyai hubungan yang sangat dekat, dimana Ilmu Negara memberikan dasar-dasar teoritis kepada Hukum Tata Negara, sedangkan Hukum Tata Negara merupakan konkretisasi dari teori-teori Ilmu Negara.

2. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik

Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara.

Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut

Hubungan antara Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik dinyatakan juga oleh **J. Barrents** dalam bukunya yang berjudul 'De Wetenschap der Politiek', menyebutkan bahwa hubungan kedua bidang ilmu tersebut adalah Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menjelaskan bahwa pertautan antara Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik disebabkan karena Ilmu Politik diperlukan untuk mengetahui latar belakang dari suatu perundang-undangan. Di samping keputusan-keputusan politik merupakan peristiwa yang banyak pengaruhnya terhadap Hukum Tata Negara.

3. Hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi Negara

Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam, sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang benar-benar bergerak. Hal tersebut dapat dilihat pada sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, keputusan tersebut harus diserahkan atau dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang.

C. SUMBER SUMBER HUKUM TATA NEGARA

1. Sumber Hukum Materil

Sumber Hukum Materil ialah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum.

2. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil ialah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya inilah, sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum itu berlaku umum.

Sumber hukum formil Hukum Tata Negara, meliputi:

- a. Undang-undang;
- b. Kebiasaan (costum) dan adat
- c. Perjanjian antara negara (traktat)
- d. Keputusan hakim (jurisprudensi)
- e. Pendapat ahli hukum terkemuka (doktrin)

Sedangkan , Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie membagi sumber HTN menjadi 7 macam, yaitu:

- a. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis
- b. UUD, baik pembukaannya maupun pasal-pasalannya
- c. Peraturan perundang-undangan tertulis
- d. Yurisprudensi peradilan
- e. Konvensi ketatanegaraan
- f. Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius comminis opinio doctorum*
- g. Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional

D. ASAS ASAS HUKUM TATA NEGARA

1. Asas Pancasila

Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah/ asas dasar negara adalah Pancasila yang artinya setiap tindakan/perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materiil, sehingga setiap isi peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.

2. Asas Negara Hukum

Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa " Negara Indonesia adalah negara hukum dimana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945". Atas ketentuan yang tegas diatas maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum.

3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada ditangan rakyat. Sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat.

4. Asas Negara Kesatuan

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan " Negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik". Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada ditangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ialah pemerintah pusat.

5. Asas Pembagian kekuasaan dalam check and balances

Pemisahaan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke yaitu Kekuasaan legislatif, Kekuasaan eksekutif, Kekuasaan federatif. Sedangkan Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu trias politica, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orang nya maupun fungsinya.

E. SEJARAH TATA NEGARA INDONESIA

1. Perubahan konstitusi

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu :

a. UUD 1945 (Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

- b. UUD RIS/Republik Indonesia Serikat (Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)

Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

- c. UUD SEMENTARA/UUDS (Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapai kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

- d. UUD 1945 hasil amandemen (Periode 5 Juli 1959 – sekarang)

(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)

Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Perubahan itu dilakukan karena majelis permusyawaratan rakyat sementara orde lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan undang-undang dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia hasil amandemen ini pula dibuat dengan lebih terperinci.

2. Perubahan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan.

a. Perubahan bentuk Negara

Berdirinya negara republik Indonesia serikat, maka konstitusi RIS sebagai undang-undang dasarnya. Sehingga UUD 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian, yaitu Negara republik Indonesia di Yogyakarta. Sementara bentuk Negara berubah dari kesatuan (1945-1949) menjadi federal pada tanggal 27 desember 1949 dan sistem pemerintahannya dari presidensial versi UUD 1945 menjadi parlementer.

Pada april 1950 diadakan konferensi antara RIS ,Negara Indonesia timur , dan Negara sumatera timur. Keputusannya adalah membentuk Negara kesatuan dan Negara republic Indonesia proklamasi Yogyakarta harus di bubarkan.

Pada 19 mei 1950 , Mohammad Hatta dan perdana menteri republik Indonesia Abdul Halim sepakat membubarkan republic Indonesia untuk membentuk Negara baru, Negara kesatuan republik Indonesia.

Pada 15 agustus 1950, Sukarno menandatangani UUD sementara republik Indonesia dan dua hari kemudian RIS secara resmi dibubarkan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan.

b. Perubahan bentuk dan sistem pemerintah

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah memberlakukan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer, tetapi juga karena dalam pelaksanaan kedua sistem tersebut sering menimbulkan permasalahan karena ketidaktegasan dan ketidakjelasan terhadap system yang diberlakukan.

Pada tahun 1945- 1949 . Hasil rapat PPKI menetapkan UUD 1945 menjadi konstitusi di dalamnya termuat semua hal yang menjadi dasar Negara serta tujuan Negara. Serta hasil rapat juga menetapkan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang sangat tepat dan relevan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Dimana sistem ini

rakyatlah yang memilih siapa presidennya dan nantinya presiden yang akan memimpin Negara sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

Namun sistem tersebut berubah pada tahun 1949-1950 hal itu disebabkan adanya konferensi meja bundar(KMB) antara Indonesia dengan Belanda yang mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dengan di tetapkannya konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun tidak seluruhnya ditetapkan maka sistem pemerintah saat itu disebut parlementer semua.

Pada tahun 1950-1959 sistem pemerintahan yang digunakan masih parlementer. Lalu pada tahun 1959 dikeluarkannya dekret presiden, dengan dikeluarkannya dekret presiden ini diiringi dengan perubahan sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial.

F. KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK HUKUM TATA NEGARA

1. Pengertian

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yaitu negara.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3 yaitu:

- 1) Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
- 2) Die Verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
- 3) Die geschriebene verfassung. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

2. Pembagian dan Klasifikasi Konstitusi

Carl Schmitt dan K.C wheare dalam bukunya "Verfassungslehre" membagi konstitusi dalam empat bagian antara lain:

a. Konstitusi absolut (absolut begriff der verfassung)

1) Konstitusi sebagai kesatuan organisasi

Dalam hal ini kesatuan organisasi ini menjangkau semua perangkat hokum yang ada kaitannya dengan kenegaraan serta semua organisasi yang ada dalam negara.

2) Konstitusi sebagai pembentuk Negara bahwa dengan diberlakukannya konstitusi, dapat segera ditunjukkan kelengkapan bentuk dari negara tersebut, apakah bentuknya itu demokrasi ataukah monarki. Mengenai sendi demokrasi itu (secara langsung atau tidak langsung) telah mengemukakan suatu identitas bahwa dalam hal ini kepentingan konstitusi tertuju kepada rakyat, perjuangannya jalan mencapai tujuannya guna mebncai tujuan/cita-cita dengan penuh keberhasilan. Sedangkan sendi yang berkaitan dengan monarki menunjukkan suatu representasi, yaitu adanya raja sebagai kepala negara yang berlaku secra turun temurun sebagai suatu lambang dari bentuk negara, tetapi dalam hal kekuasaannya tetap, pada dasarnya berada pada rakyat.

3) Konstitusi sebagai faktor pengimbang pelancar (integrasi)yaitu konstitusi dapat menciptakan integrasi yang bersifat fungsional seperti halnya memantapkan persatuan dan perkembangan bangsa dengan jaminan pemilihan umum, referendum, pembentukan parlemen, kabinet, dan lain sebagainya.

4) Konstitusi sebagai norma-norma hukum tertinggi yang menjadi dasar dari segala-galanya, atau menjadi sumber bagi segala peraturan hidup yang diberlakukan dalam negara tersebut.

b. Konstitusi Relatif

Dalam hal pengertian konstitusi yang relatif ini penjelasan yang dikemukakan adalah sekitar konstitusi dalam arti formal atau yang tertulis.

c. Konstitusi Positif

Konstitusi dalam arti positif mengandung pengertian sebagai keputusan politik tertinggi, yang menentukan nasib seluruh rakyat dimana konstitusi itu diberlakukan.

d. Konstitusi Ideal

Jika melihat dari segi demokrasi atau kepentingan rakyat, maka konstitusi yang ideal dengan sendirinya yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi, cita-cita yang timbul lainnya dengan melalui konstitusi agar pemerasan, perbuatan sewenang-wenang terhadap rakyat dapat dihilangkan, dan sebagai gantinya rakyat diberikan hak-hak kebebasan dan persamaan hak.

3. Nilai Konstitusi

Karl Loewenstein mengadakan suatu penyelidikan mengenai apa arti dari suatu konstitusi tertulis (UUD) dalam suatu lingkungan nasional, terutama bagi rakyat biasa sehingga membawanya kepada tiga jenis penilaian konstitusi sebagai berikut:

a. Nilai Normatif

Nilai ini diperoleh apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar secara murni dan konsekuen, konstitusi itu ditaati dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikitpun.

b. Nilai Nominal

Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannyakurang sempurna. Sebab-sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.

c. Nilai Semantik

Suatu konstitusi bernilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum berlaku namun dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi tersebut hanyalah sekedar suatu istilah belaka, sedang dalam pelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

4. Sifat Konstitusi

a. Bersifat Luwes/Fleksibel

Konstitusi yang bersifat luwes atau fleksibel adalah konstitusi yang baik, karenanya dapat dengan mudah menerima perubahan apabila diperlukan sekali, serta dengan mudah pula dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

b. Tertulis dan Tidak Tertulis

1) Bersifat tidak tertulis:

Suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal,. Seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand.

2) Bersifat tertulis:

Konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal.

5. Materi Muatan Konstitusi

Menurut A.A.H. Struycken, Undang-Undang Dasar (Groundwet) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
- d. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin .

Apabila masing-masing muatan kita kaji, dapat kita tarik kesimpulan bahwa selain sebagai dokumen nasional dan tanda kedewasaan dari kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi juga sebagai alat berisi sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan.

6. Perubahan Konstitusi

Secara garis besar konstitusi dapat berubah atau diubah melalui dua jalan, yakni melalui cara berikut:

a. Jalan yuridis formal.

Jalan pertama, dilakukan sesuai dengan ketentuan formal mengenai perubahan konstitusi yang terdapat di dalam konstitusi itu sendiri dan mungkin diatur dalam peraturan perundangan lain.

b. Jalan non yuridis formal atau jalan politis.

Perubahan konstitusi tersebut biasanya terjadi Karena sebab tertentu atau keadaan khusus yang mendorong terjadinya perubahan konstitusi. Perubahan demikian dapat berupa perubahan total atau sebagian ketentuan saja sesuai kebutuhan. Perubahan

konstitusi secara politis ini kalau berjalan dan dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat, maka perubahan demikian secara yuridis adalah sah. Atau dengan kata lain, perubahan konstitusi secara de facto yang kemudian dapat diterima oleh seluruh rakyatnya, maka konvensi statusnya berubah menjadi de jure.

G. ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA

Kekuasaan Negara adalah kewenangan suatu Negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan serta bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan sematamata. Adanya pembatasan hokum dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara adalah cirri-ciri Negara hukum.

Menurut Montesquieu, ada tiga pembagian kekuasaan Negara modern yaitu:

1. Fungsi Legislatif merupakan kekuasaan yang memiliki kewenangan guna membuat dan membentuk undang-undang
2. Fungsi eksekutif merupakan kekuasaan guna menjalankan undang-undang
3. Fungsi Yudikatif merupakan kekuasaan guna menjaga undang-undang, peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum.

Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normative bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.